
**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGANAN ASET
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2023**

Muhamad Kayadi
Universitas Gunung Rinjani
email: muhamadkaryadi7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan data Primer dengan populasi dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 32 orang. Teknik pengambilan sampling dengan *Nonprobability sampling* yaitu sampling jenuh dengan jumlah responden sebanyak 32 orang. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji validitas, uji reliabelitas, asumsi klasik dan uji t dan uji f yang diolah menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Pengendalian akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Sistem pelaporan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan mampu memprediksi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja

PENDAHULUAN

Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan, Transparan dan akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki

daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya (Bastian,2010)

Salah satu masalah penting yang termasuk dalam perkembangan organisasi sektor publik adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja sektor public untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas merupakan kunci dalam mencapai good governance dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiansikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian,2010)

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam perencanaan strategis melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga. Pengukuran pencapaian kinerja B Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan.

Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas kiranya memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja, anggaran menjadi sangat penting karena akan berdampak pada kinerja pemerintah. Menurut Hidayattullah dan Herdjiono (2014) menyatakan bahwa Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Ginting (2010) Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran yang sudah ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti atau dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Proksi kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian ini adalah Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan yang tepat. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat pemerintah untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target anggaran yang disusun akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah. Dengan adanya sasaran yang jelas diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Metha Kurnia Sari 2016 tentang pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial skpd di kabupaten sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Sukoharjo

Pengendalian akuntansi yang dijelaskan oleh Hery (2014) adalah suatu prosedur dan kebijakan dalam menyediakan informasi akuntansi secara akurat, melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa semua pegawai telah menaati peraturan yang berlaku.

Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian akuntansi memproksikan bahwa Pengendalian akuntansi berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penyelewengan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Berhubungan dengan semakin maraknya permasalahan mengenai penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran kas maka dari itu kita membutuhkan adanya pengendalian internal agar bisa dengan mudah dapat menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau mungkin permasalahan yang ada akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa diketahui secara jelas.

Dari penjelasan diatas, terdapat keterkaitan antara manajemen resiko, kegiatan audit internal sistem pengendalian internal. Kegiatan audit internal membantu manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi, mengatasi dan memberikan solusi terhadap resiko yang dihadapi pemerintah sehingga sistem pengendalian internal pemerintah menjadi efektif dan efisien. Kegiatan audit internal juga membantu pemerintah dalam mengawasi, mengidentifikasi, memberikan rekomendasi terhadap peraturan mengenai nilai etika yang ada di pemerintah sehingga pemerintah tidak mengalami depisit anggaran.

Penyediaan informasi yang akuntabel tidak bisa dipisahkan dengan sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mengemukakan laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara objektif, jujur, dan transparan (BPKP, 2011). Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang. Penelitian Wahyuni (2013) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Khasanah (2016) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Adanya peraturan pemerintah ini menjadikan dasar bagi semua entitas yaitu pemerintah daerah harus melakukan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak terutama kepada SKPKD. Tujuan umum pelaporan keuangan pada pemerintahan ialah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dan penggunaan sumber-sumber daya finansial serta menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dan pencapaian tujuan secara efisien. Oleh karena itu, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat pada setiap instansi pemerintah, dengan itu pemerintah harus mengupayakan hasil yang memuaskan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Standart Akuntansi Pemerintah (SAP).

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan dengan harapan agar setiap pemerintah daerah dapat menerapkan SAP dengan benar terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi terwujudnya laporan keuangan yang lebih berkualitas dan lebih akurat.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur di harapkan dapat membantu urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat mencapai efektifitas akuntabilitas secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata (Mardiasmo, 2009). Hal ini, sesuai dengan tupoksi dari (DPPKA) yaitu, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah; penyusunan rencana dan program kerja dinas; perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, aset daerah dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada wabsite resmi (DPPKA). Maka dar itu, (DPPKA) memberikan gambaran mengenai kondisi, aset dankinerja keuangan pemerintah daerah. Namun sampai sekarang pelaporan (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur terkait kejelasan sasaran anggaran dan pelaporan keuangan menjadi problem (Nikolas, 2016). Permasalahan (DPPKA) terletak pada komiten organisasi (Manulang, 2017). Masalah lain yang terdeteksi meliputi, kualitas sumber daya manusia masih tergolong sedikit, pengendalian intren dan efektivitas manajemen aset (Ekayanti, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis dan menekankan pada fenomena-fenomena serta hubungan-hubungannya yang objektif dan dikaji secara kuantitatif artinya menggunakan teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian ini merupakan asosiatif dengan bentuk hubungan sebab akibat (*causal*). Menurut sugiyono (2016:37) hubungan (*causal*) adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi penelitian (Kuncoro, 2011:19). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 39 orang. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Kuncoro, 2003: 20). Teknik pengambilan sampling dengan *Nonprobability sampling* yaitu Sampling Jenuh. Menurut Sugiyono (2001:61) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Secara teknis populasi yang dijadikan sampel, merupakan pegawai yang paling representatif dalam menjelaskan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur.. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada. Populasi dan sampel adalah semua pegawai yang memiliki jabatan fungsional dan memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur.

Metode analisis data adalah cara yang akan digunakan untuk mengelola data yang diperoleh agar dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat dibuktikan secara empiris. Seluruh data yang diperoleh diolah menggunakan *software* SPSS melalui kuesioner yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Hartono, 2014:195) termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik dan diagram statistik deskriptif dilakukan bila peneliti hanya mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut diambil. statistik deskriptif juga digunakan untuk membandingkan data sampel (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibagian ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian terkait dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset kabupaten lombok timur pada uji hipotesis dan pembahasan.

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 1
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-4.473	11.466	-.390	.699
	kejelasan sasaran anggaran	.735	.317	2.322	.028
	pengendalian akuntansi	.547	.141	3.891	.001
	sistem pelaporan	-.035	.249	-.141	.889

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,322 lebih besar dari t_{tabel} 2,04 atau nilai sig sebesar 0,028 kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran yang dilakukan oleh dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur sudah dijalankan dengan baik dan searah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena untuk meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintahan perlu adanya Kejelasan Sasaran Anggaran agar dapat mencapai tujuan-tujuan pelaksanaan tugas dari organisasi tersebut. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Wadi (2020) mengemukakan bahwa norma subyektif, kinerja aparatur pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa. Artinya sikap pemerintah desa juga mampu merubah keadaan didalam internal pemerintah desa kaitanya dengan

pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga transparansi keuangan desa harus dapat mudah diakses oleh masyarakat, karena banyak aparatur pemerintah desa ditemukan mengelapkan keuangan desa karena sikap dan karakter pemerintah desa sangat tidak baik sehingga apabila sikap dan karakter pemerintah desa sangat baik akan membentuk transparansi anggaran semakin baik pula. Hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur pemerintah dalam melakukan suatu pekerjaan dapat di evaluasi tingkat kinerja, maka kinerja aparatur pemerintah harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai sehingga apabila kinerja aparatur sangat akan menyebabkan transparansi semakin baik juga, begitu juga dengan kejelasan sasaran anggaran akan menyebabkan transparansi semakin baik juga, tidak dengan *prosocial lbehavior* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa. norma subyektif, kinerja aparatur pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran dan transparansi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. *Prosocial behavior* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Penelitian Siska Septiana (2022) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengukur, mengevaluasi akuntabilitas kinerja dan dapat memotivasi manejer unit bisnis dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan (Bastian 2011:459). Pengendalian akuntansi diperlukan untuk pengambilan keputusan operasi agar akuntabilitas kinerja yang diharapkan dapat meningkat (Darma 2004). Pengendalian intern akuntansi adalah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengendalian akuntansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,891 lebih besar dari t_{tabel} 2,04 atau nilai sig sebesar 0,001 kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Apabila pengendalian akuntansi baik akan menyebabkan akuntabilitas kinerja baik juga, setiap pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh pemerintah daerah tidak terlepas juga dengan pertanggung jawaban dari sisi keuangan sehingga peran pengendali akuntansi dalam hal ini sangat mendukung terciptanya pertanggung jawaban yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indudewi (2009) dan Setiawan (2013) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Penelitian ini juga sejalan dengan konsep *Stewardship theory* Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen yang tak luput dari

pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen. Eksistensi pengendalian akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *manage* stakeholdernya tergantung pada strategi yang di adopsi perusahaan baik strategi aktif maupun pasif. Salah satunya melalui penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap manajemen. Kepercayaan ini yang seterusnya menjadi modal awal bagi manajemen untuk melakukan akses permodalan dan sebagainya. *Stakeholder theory* menegaskan bahwa sistem pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengelola kepercayaan para pemangku kepentingan, dimana keberadaan *stakeholder* akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap urgensi praktis akuntansi perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Jika laporan yang dibuat pemerintah daerah dengan baik akan menyebabkan pertanggung jawabn baik juga. Laporan yang dibuat oleh para aparatur pemerintah daerah harus andal dan relevan sehingga jika laporan yang buat tidak baik pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan akan tidak baik pula.

Afilu (2015) hasilnya “Pengujian persial variabel sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, didukung pula dengan penelitian Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Penelitian ini juga tidak sejalan dengan konsep *Stakeholder Theory* Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian, maka keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. *Stakeholder* dan Organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggungjawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari akuntabilitas itu di tentukan dengan hubungan antara *stakeholder* dan organisasi.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional; terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada hasil pengujian bahwa nilai sig untuk hasil uji kelayakan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, mampu memprediksi variabel dependen akuntabilitas kinerja. Begitu juga dengan nilai F_{hitung} lebih besar dengan nilai F_{tabel} $7,726 > 2,95$ artinya variabel independen mampu memprediksi variabel dependen. Judarmita (2017) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan audit kinerja berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung. Artinya semakin baik kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung akan semakin baik.

KESIMPULAN

Munculnya penelitian ini sebab sistem pelaporan dan anggaran perlu ditingkatkan dalam proses penyusunan program kerja pemerintah daerah, baik program pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Pengendalian akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Sistem pelaporan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan mampu memprediksi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada dinas pendapatan pengelola keuangan aset Kabupaten Lombok Timur.

REFRENSI

- Agus Hidayatullah, 2013, Alwasim Al-Quran Tajwid Kode, Translit Perkata, Terjemah Perkata. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 135–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aa.v1i2.555>
- Apriliani TS, Wijayanti RR. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *J Akunt Terap dan Bisnis*. 2022;2(2):92–100.
- Arif, L. N., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Arisgraha, A. H. (2013). Sistem Pengendalian Manajemen Pada Bidang Penjualan Studi Kasus Pada Pt X (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA.
- Cantika, Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja

- Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Dana Rizky Anatasia, D. R. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Ekayanti, S. M., Rifa, A., & Irwan, M. (2018). Determinants effectiveness fixed asset management of district government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, 9(1), 1219-1229.
- Frink, D. D., & Klimoski, R. J. (2004). Advancing accountability theory and practice: Introduction to the human resource management review special edition. *Human Resource Management Review*, 14, 1–17.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Edisi Tujuh). In Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indraswari. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro*, 6(7), 57–69.
- Judarmita I Nyoman, Ni Luh Supadmi. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akunt.* 2017;21(3):1719–46.
- Mada S, Kalangi L, Gamaliel H. (2017) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *J Ris Akunt Dan Audit “Goodwill.”* 2017;8(2):106–15.
- Metha Kurnia Sari 2016. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Di Kabupaten Sukoharjo. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mikoshi MS. 2020 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat).
- Mudrajad, Kuncoro. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Nurkhamid, M. (2008). Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 3(1), 45–75
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4 (1), 14–33.
- Sarifudin, M., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 4(1), 123–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Setiawan, E., Andreas, & Rusli. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/2355-66854>

- Suardana IMS, Fitriah, I Made Murjana. Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi, Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Lokasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecamatan Pringgabayakabupaten Lombok Timur. *J Akunt dan Keuang Syariah - ALIANSI*. 2021;3(2):1–12.
- Wahyuni, Raja Adri Satriawan Surya & Enni Savitri. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Universitas Riau*, 3 (2): 52-72.
- Widaryanti W, Pancawardani NL. Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekon J Ilm Ekon*. 2020;15(2):477–92.
- Yusliana dan Nadirsyah. Pengaruh Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Efektifitas Sistem Pengendalian Manajemen (Studi Pada Fakultas-Fakultas Dalam Lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh). *J Telaah dan Ris Akunt*. 2017;10(2):153–62.
- Zirman, E. D., & Rozi R. M. (2010) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Universitas Riau*, 2 (3): 155-174.
- Zulharman K. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Universitas Riau*, 1 (2): 82-97.